

Laporan Riset

Pro Kontra Wacana *Full Day School*

Ni Wayan Widayanti Arioka*

Universitas Udayana

Info Artikel

Sejarah artikel:

Dikirim 7 Februari 2017

Direvisi 17 Maret 2017

Diterima 27 Mei 2017

Kata Kunci:

Pro

Kontra

Wacana

*Full Day**School*

Abstrak

Full day school atau sekolah sehari penuh merupakan salah satu wacana yang dilontarkan oleh Muhadjir Effendy di awal masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Seperti namanya sistem *full day school* atau sekolah sehari penuh berarti bahwa siswa akan bersekolah seharian penuh, dari pagi hingga sore hari.

Wacana yang dicetuskan pada tanggal 7 Agustus 2016 ini langsung menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Permasalahan pro dan kontra wacana kebijakan Mendikbud mengenai sekolah sehari penuh ini kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan pendidikan kritis. Adapun data yang digunakan adalah data dari media *online*, yakni dari portal-portal berita *online* dan tulisan-tulisan *online (blog)* yang merespons wacana sekolah sehari penuh.

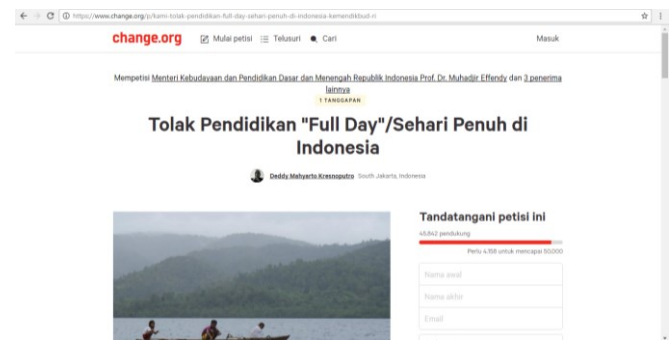
© 2017 Komunitas Studi Kultural Indonesia. Diterbitkan oleh An1image. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Belum genap dua minggu menjabat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy sudah melontarkan wacana yang kontroversial. Sistem *full day school*, menurut Muhadjir Effendy, akan diterapkan pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), untuk sekolah negeri maupun swasta [1]. Wacana tentang pemberlakuan sekolah sehari penuh ini mulai diberitakan di media *online* sejak tanggal 8 Agustus 2016.

"Jadi, anak pulang pukul lima sore, orangtuanya bisa jemput. Sehingga anak kita tetap ada yang bertanggung jawab setelah dilepas pihak sekolah,"

Demikianlah ungkapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru dilantik 27 Juli 2016 silam, seperti yang dikutip dari kompas.com [2]. Pemberitaan itu langsung menuai reaksi dari berbagai pihak [3]. Bahkan di hari yang sama, Deddy Mahyarto Kresnoputro sebagai orangtua siswa, langsung membuat petisi "Tolak Pendidikan "Full Day" atau Sehari Penuh di Indonesia" di www.change.org [4] seperti pada tampilan citra 1.



Citra 1. Protes melalui change.org

Petisi ini keesokan harinya (9/8) sudah ditandatangani oleh 25.442 pendukung, dan hingga kini telah ditandatangani oleh 45.842 pendukung. Selain petisi yang dibuat Deddy, juga di tanggal 8 Agustus 2016, satu karya tulisan panjang juga ditulis Dandhy Dwi Laksono di akun *Facebook*-nya dengan judul "*Fool Day School*" [5].

Dandhy menanyakan kepada pemerintah dituliskannya tentang apa sesungguhnya pemicu munculnya gagasan *full day school*, karena gagasan ini dirasa datang tiba-tiba dan tanpa ada sangkutan perkara atau hasil kajian apa pun. Dandhy juga merasa gagasan ini bias urban atau kota, dan yang paling esensi, kebijakan ini melupakan hakikat pendidikan sebagai

* Peneliti koresponden: Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran, Badung-Bali 80361 Mobile: +628568094162 | E-mail: widayantiarioka@gmail.com

ajang penempatan generasi baru mempersiapkan kehidupan dalam konteks sosial dan lingkungannya.

Terakhir ini ditambahkan oleh Dandhy dalam tulisannya, beberapa contoh transmisi kebudayaan yang dilakukan oleh orangtua kepada anaknya di Boti, Lamalera, dan Suku Bajo di Pulau Bungin. Hal yang sulit dilakukan oleh pihak sekolah. Tulisan panjang dalam bentuk status *Facebook* ini sudah dikomentari oleh 1.100 orang dan disebarluaskan oleh 4.723 orang.

Akibat banyaknya respons negatif terhadap wacana *full day school*, wacana ini sempat diberitakan batal dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2016 [6]. Namun, ternyata pada tanggal 11 Agustus 2016 *Kompas.com* memberitakan bahwa gagasan yang telah mendapat dukungan dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ini akan tetap dilaksanakan [7].

Akhir September, diberitakan oleh kantor berita Antara bahwa sudah ada 500 sekolah yang dipersiapkan menjadi percontohan penerapan program *Full Day School*. 500 sekolah yang semuanya adalah sekolah di Jakarta ini, terdiri dari berbagai jenjang sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA [8].

Permasalahan wacana *full day school* terlihat bahwa terdapat praksis budaya terkait kebijakan pendidikan yang terekspresi dari interaksi dan respons yang diberikan oleh masyarakat, pemangku kebijakan, orangtua siswa, siswa, kalangan pendidik, dan pemerhati pendidikan. Melalui berita-berita dan tulisan-tulisan yang betebaran di dunia maya, terlihat adanya praksis pro dan kontra terhadap wacana kebijakan *full day school*.

Pihak pro adalah mereka yang menerima rasionalisasi yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pencetus ide. Di sisi lain, mereka yang kontra merupakan pihak yang tidak terima dengan rasionalisasi yang dilakukan Mendikbud karena menemukan berbagai hal yang dianggap ganjil dan tidak masuk akal, sehingga lebih memilih tetap dengan sistem sekolah setengah hari.

Permasalahan pro dan kontra wacana kebijakan Mendikbud mengenai sekolah sehari penuh ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan pendidikan kritis. Pendekatan pendidikan kritis merupakan konsep yang berkembang dari implementasi teori kritis dalam bidang pendidikan [9].

Pendekatan ini membongkar jebakan ideologis yang membelenggu kesadaran masyarakat melalui proses pendidikan yang membebaskan atau munculnya kesadaran kritis. Penggunaan pendekatan pendidikan kritis dalam mengkaji permasalahan pro dan kontra kebijakan sekolah sehari penuh yang diwacanakan oleh Mendikbud diharapkan mampu membongkar ideologi yang dimiliki oleh kedua belah pihak, baik yang pro dan yang kontra.

Sehingga akhirnya ditemukan secara gamblang bagaimana proses pro dan kontra terkait masalah usulan sekolah sehari penuh ini berlangsung, ideologi apa yang diusung, hingga pihak yang memiliki kuasa dan yang melanggengkan kekuasaan. Adapun data yang digunakan adalah data dari media *online*, yakni dari portal-portal berita *online* dan tulisan-tulisan *online (blog)* yang merespons wacana sekolah sehari penuh.

Diskusi : Rasionalisasi dan Ideologi di Balik Wacana *Full Day School*

1. Citra Sekolah Ideal

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan rencana perpanjangan jam sekolah dasar dan menengah itu berawal dari keinginan mengimplementasikan *Nawa Cita* atau agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Muhadjir ingin mengubah porsi pendidikan di tingkat sekolah dasar menjadi 70 persen pendidikan karakter dan 30 persen pendidikan pengetahuan. Sementara di tingkat sekolah menengah, angka itu diubah menjadi 60 persen pendidikan karakter dan 30 persen pendidikan pengetahuan [6].

Alih-alih mengurangi porsi belajar ilmu pengetahuan, atau mengusahakan agar orangtua bisa berperan aktif membantu meningkatkan pendidikan karakter anak, Muhadjir Effendy melontarkan gagasan yang akhirnya menyerahkan seluruh tanggung jawab akan pendidikan pengetahuan dan pendidikan karakter kepada sekolah. Sekolah yang baik adalah yang siswanya mampu terdidik secara pengetahuan dan karakternya, sehingga diperlukan waktu di sekolah yang lebih lama.

Anehnya lagi, Muhadjir Effendy menjelaskan soal konsep *Full Day School* atau sekolah seharian sudah diterapkan di beberapa negara, dan salah satu negara yang sukses menerapkan konsep tersebut adalah Finlandia [10].

Padahal Finlandia sendiri terkenal dengan jam sekolah yang sedikit. Hanya 5-6 jam perhari. Jam sekolah di Finlandia ini justru lebih dekat dengan jam belajar pada sistem sekolah setengah hari yang umum terjadi di Indonesia. Jepang, yang juga berhasil dalam bidang pendidikan dan dikenal menganut sistem *full day school* juga memberikan waktu siswanya di sekolah 5-6 jam saja.

Sekolah memang berakhir di sore hari, namun diawali pukul 09.30. Sangat berbeda dengan program *full day school* yang dimulai dari pukul 8 pagi, atau bahkan mungkin pukul 7 pagi di Daerah Jawa dan berakhir pukul 5 sore.

Selanjutnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengakui gagasannya mengenai penambahan jam belajar anak di sekolah dengan program *full day school*, ia dapat dari

sekolah-sekolah terutama sekolah swasta yang telah lebih dulu terapkan konsep tersebut [11].

Sekolah swasta yang sudah mampu menerapkan program *full day school* tentunya adalah sekolah swasta elite, mengingat pembiayaan sekolah sehari penuh akan lebih tinggi daripada sekolah setengah hari yang umum terjadi di Indonesia. Hanya kaum elite yang mampu membayarnya.

2. Pendidikan= Sekolah

Sudah menjadi wacana umum bahwa persoalan besar di dunia pendidikan adalah adanya persepsi yang menyamakan pendidikan dengan persekolahan. Maka untuk bisa dipandang sebagai orang yang terdidik, mereka harus mengenyam pendidikan formal di sekolah terlebih dahulu. Orang-orang yang ahli secara otodidak dan tidak melalui jenjang pendidikan sekolah tidak banyak diakui keahliannya oleh dunia.

Persepsi bahwa pendidikan disamakan dengan persekolahan ini semakin dikukuhkan oleh Kemendikbud melalui program *full day school*. Peran mendidik siswa dibebankan sepenuhnya kepada sekolah.

"Dengan sistem *full day school* ini, secara perlahan, anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi 'liar' di luar sekolah ketika orang tua mereka belum pulang dari kerja," kata Muhadjir setelah menjadi pembicara dalam pengajian di Universitas Muhammadiyah Malang, Ahad, 7 Agustus 2016 [12].

Apabila siswa akhirnya tetap 'liar' sekalipun sudah sekolah sehari penuh, maka sekolah bisa dengan mudah dipersalahkan oleh masyarakat, bahkan orangtua si siswa. Orangtua bisa dengan tenang bekerja dan berkarier tanpa harus memikirkan mendidik karakter anaknya. Pun masyarakat sekitar tidak perlu ambil pusing untuk peduli dengan anak-anak usia sekolah di lingkungannya, karena itu sudah menjadi tanggung jawab sekolah.

Padahal menurut Henry Giroux, pendidikan kritis bukan hanya soal metodologi pembelajaran di kelas, tapi mestinya melampaui kehidupan sekolah [9].

Penyamaan antara pendidikan dengan persekolahan tentunya bertentangan dengan semangat pendidikan kritis yang justru membedakan pendidikan dengan persekolahan.

Salah satu gagasan pendidikan kritis, pendidikan dianggap sebagai proses belajar lewat pengalaman sosial alamiah masing-masing orang. Ini berbeda dengan persekolahan, yang hanya merupakan salah satu jenis pendidikan.

Anak sekolahan tidak berarti manusia berpendidikan, karena sekolah yang ada sekarang hanya perpanjangan tangan negara *otoritarian* saja. Sekolah memerosotkan tanggung jawab individual, dan dengan demikian ia menjadikan anak-anak tidak bisa dididik dalam makna pendidikan yang sejati [13].

3. Citra Orangtua yang Ideal

Alasan lainnya yang diutarakan Muhadjir Effendy sampai berniat memberlakukan kebijakan *full day school* adalah karena anak yang pulang ke rumah di saat kedua orangtuanya masih bekerja cenderung kurang pengawasan. Dengan sekolah sehari penuh, anak akan pulang ke rumah tepat saat kedua orangtuanya juga sudah tiba di rumah.

Anak cenderung akan lebih melakukan hal positif di sekolah [14]. Dari sini bisa dilihat bahwa Mendikbud melakukan rasionalisasi yang mencerminkan citra orangtua yang ideal. Orangtua ideal adalah mereka yang bekerja sehari penuh dari pagi hingga sore hari, dan libur di hari Sabtu dan Minggu.

Gambaran orangtua semacam ini adalah mereka yang bekerja *kantoran* di perusahaan swasta atau negeri. Mendikbud mengabaikan orangtua yang bekerja dengan sistem *shift* sehingga memungkinkan jam kerja malam, atau pengusaha yang jam kerjanya lebih fleksibel. Bahkan orangtua di daerah yang berprofesi sebagai petani, nelayan, dan sebagainya, yang tidak mengacu pada jam kerja 8 pagi sampai 5 sore.

4. Sistem yang Bias Kota dan Mendukung Ideologi Kapitalis

Seperti yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa sistem *full day school* yang dicetuskan terlalu bias kota. Bahwa mereka yang orangtuanya bekerja sesuai jam kantor adalah orangtua yang bekerja di kota. Mereka yang di daerah, yang orangtuanya bekerja sebagai petani, buruh dengan sistem *shift*, nelayan, dan sebagainya, terabaikan.

"Saya ingin sekolah yang menjadi rumah kedua, bukan swalayan atau *mall*," kata Mendikbud

Ungkapan ini semakin mengukuhkan bagaimana sistem ini sangat bias kota dan terkait dengan ideologi kapitalis. Karena hanya kota besar saja yang memiliki *mall*. Dan hanya mereka yang mampu saja yang bisa pergi ke *mall* sepulang sekolah, hingga menjadikan *mall* sebagai rumah keduanya.

Ideologi kapitalis juga terlihat dari acuan Mendikbud dalam merumuskan sistem *full day school* yaitu sekolah swasta elite. Apabila diterapkan di seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, biaya pendidikan tentu saja semakin tinggi. Mendikbud juga mengabaikan adanya kemungkinan anak-anak yang masih harus membantu orangtuanya bekerja atau membereskan pekerjaan rumah selepas sekolah. Program ini juga akan memberatkan transmisi kebudayaan di beberapa

daerah seperti yang diungkapkan Dandhy Dwi Laksono dalam tulisannya di *Facebook* [5].

Kesimpulan

Kuasa dan *proxy* kuasa di balik wacana *full day school*. Melihat dari uraian sebelumnya, terlihat bahwa kuasa yang memegang peranan di balik wacana *full day school* adalah ideologi kapitalis. Pendidikan karakter yang diharapkan Presiden terwujud melalui *Nawa Cita*-nya ternyata malah semakin membebani siswa karena jam belajarnya justru ditambah.

Mendikbud tidak mengutak-atik kurikulum sekolah terkait ilmu pengetahuan, karena kebutuhan pasar akan siswa yang tahu banyak hal dan siap bekerja memenuhi kebutuhan pasar kapital. Kemudian, sekolah sehari penuh nantinya juga hanya akan menguntungkan pihak yang bermodal besar saja.

Mereka yang pas-pasan atau bahkan tidak cukup mampu menyekolahkan anaknya akan semakin diberatkan dengan kewajiban menyekolahkan anaknya seharian. Yang tentunya menambah beban uang saku serta tentunya biaya sekolah lainnya yang sebelumnya tidak dikeluarkan ketika sistem sekolahnya masih setengah hari.

Mendikbud, Presiden, dan Wakil Presiden bisa disebut sebagai *proxy power* karena mereka menjadi kaki tangan ideologi kapitalisme, melalui program *full day school*. Para otoritas pengambil kebijakan ini tetap akan memuluskan program *full day school* sekalipun banyak respons negatif dari masyarakat. Hal ini memperlihatkan kuasa yang mereka miliki.

Pada tataran praksis budaya pendidikan terlihat adanya pro dan kontra terhadap *full day school*. Namun, sekalipun banyak respons negatif tentang program ini, program ini akan tetap dilaksanakan. Terkait dengan pelaksanaan program, maka dipilihlah 500 sekolah percontohan, yang semuanya berada di Jakarta.

Dalam tataran ideologi atau politik pendidikan terlihat adanya penggiringan kesadaran palsu, melalui pencitraan sekolah ideal, pencitraan orangtua ideal, pengukuhan persepsi bahwa pendidikan adalah sekolah, dan berlakunya sistem yang bias kota serta mendukung ideologi kapitalis.

Di tataran hubungan kuasa (*power/proxy power*) ditemukan adanya hegemoni ideologi *kapitalistik*. Ideologi ini kemudian disalurkan melalui otoritas pengambil kebijakan yakni Mendikbud, yang juga mendapat dukungan dari Presiden dan Wakil Presiden.

Respons dari wacana *full day school*, pihak yang kontra kemudian melakukan *counter culture* atau *counter* hegemoni. *Counter* hegemoni dilakukan melalui petisi, tulisan dan komentar logis di dunia maya. Pihak yang kontra dengan wacana *full day school* merasa bahwa pemerintah tidak perlu

mengatur seluruh anak usia sekolah untuk bersekolah sehari penuh.

Adalah tugas orangtua, bersama-sama dengan anaknya, untuk menentukan jenis pendidikan apa saja yang akan diikuti anaknya. Dengan demikian, orangtua menjadi lebih leluasa dan tidak melepaskan tanggung jawabnya untuk memilihkan kegiatan pendidikan apa yang sesuai dengan kebutuhan anaknya di luar jam sekolah.

Orangtua yang keduanya bekerja dan berada di kota besar bisa memilih apakah anaknya akan mengenyam pendidikan di sekolah yang memang sudah menerapkan sistem *full day school*, atau tetap dengan sekolah setengah hari dan mengisi waktu anaknya sesuai jam sekolah dengan jenis pendidikan lainnya.

Pada tataran yang lebih ekstrim, *cultural counter* juga dilakukan dengan munculnya pengembangan model pendidikan *alternative "home schooling"*. *Home Schooling* adalah metode pendidikan baru yang tidak mengharuskan siswanya ke sekolah.

Guru di sistem ini bisa saja orangtua si siswa sendiri, atau mendatangkan guru yang dibutuhkan siswa. Sistem ini mulai populer di Indonesia, dan menjadi *counter attack* dari persepsi bahwa pendidikan sama dengan persekolahan.

Referensi

- [1] Wahono, Tri. 2016. "Ini Alasan Mendikbud Usulkan "Full Day School". Kompas.com. diakses pada tanggal 26 Desember 2016 dari artikel suatu *website*: <http://edukasi.kompas.com/read/2016/08/08/12462061/ini.a.lasan.mendikbud.usulkan.full.day.school>.
- [2] Ilmie, M. Irfan, 2016. "Mendikbud Usul Siswa Bersekolah Seharian Penuh, Wapres Kalla Setuju". Kompas.com. diakses pada tanggal 26 Desember 2016 dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/08/12441701/mendikbud.usul.siswa.bersekolah.seharian.penuh.wapres.ka.lla.setuju>
- [3] Prawira, Adam. 2016. "Teken Petisi, 25 Ribu Orang Tolak *Full Day School*". Sindonews.com. diakses pada tanggal 26 Desember 2016 dari artikel halaman *website*: <http://nasional.sindonews.com/read/1129940/144/teken-petisi-25-ribu-orang-tolak-full-day-school-1470739570>
- [4] Kresnoputro, Deddy Mahyarto. 2016. Petisi "Tolak Pendidikan *Full Day*". Diakses 29 Juli 2016 di halaman *website*: www.change.org
- [5] Dwi Laksono, Dandhy. 2016. *Fool Day School*. Diunggah pada 8 Agustus 2016 di www.facebook.com
- [6] Mazrieva, Eva. 2016 "Rencana Kebijakan *Full Day School*" Akan Dibatalkan". VOA Indonesia. diakses pada tanggal 26 Desember 2016 dari artikel suatu *website*: <http://www.voaindonesia.com/a/rencana-full-day-school-dibatalkan-/3457816.html>

- [7] Galih, Bayu. 2016. "Mendikbud: Program *Full Day School*" Tetap Jalan, Teknisnya Belum". Kompas.com. diakses pada tanggal 26 Desember 2016 dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/11/08580571/mendikbud.program.full.day.school.tetap.jalan.teknisnya.be lum>
- [8] Utama, M. R. Denya. 2016. "500 Sekolah Dipilih Terapkan *Full Day School*". *Antaraneews.com*. diakses pada tanggal 26 Desember 2016 dari artikel suatu *website*: <http://www.antaraneews.com/berita/586367/500-sekolah-dipilih-terapkan-full-day-school>
- [9] Widja, I Gde. 2012. *Pendidikan Sebagai Ideologi Budaya: Mengamati Permasalahan Pendidikan Melalui Pendekatan Kajian Budaya*. Denpasar: Krishna Abadi
- [10] Firmanto, Danang. 2016. "*Full Day School*, Menteri Muhadjir Ingin Seperti Finlandia". Tempo.co. diakses pada tanggal 26 Desember 2016 dari artikel suatu *website*: <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/09/079794547/full-day-school-menteri-muhadjir-ingin-seperti-finlandia>
- [11] Suastha, Riva Dessthanian. 2016. Mendikbud: "*Full Day School*" Terinspirasi dari Sekolah Swasta. *CNN Indonesia*. diakses pada tanggal 26 Desember 2016 dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160809064820-20-150046/mendikbud-full-day-school-terinspirasi-dari-sekolah-swasta/>
- [12] Rofiuddin. 2016. "PKB dan PPP Tolak Sekolah *Full Day School*". Tempo.co. diakses pada tanggal 26 Desember 2016 dari artikel suatu halaman digital di *website*: <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/08/09/079794482/pkb-dan-ppp-tolak-sekolah-full-day-school>
- [13] Freire, P. Illich, I. Fromm, E, dkk. 2009. *Menggugat Pendidikan: Fundamentalis, Konservatif, Liberal Anarkis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [14] Arifin, Zainul. 2016. "Mendikbud Siapkan Payung Hukum Sekolah Sehari Penuh". Liputan6.com. diakses pada tanggal 26 Desember 2016 artikel suatu halaman digital di *website*: <http://news.liputan6.com/read/2571892/mendikbud-siapkan-payung-hukum-sekolah-sehari-penuh>